



**PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN KONTRAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI ANTARA PEMERINTAH DENGAN
PERUSAHAAN KERJA SAMA OPERASI
(STUDI PROYEK JALAN KEMBAR KALI KADIA- Z.A.
SUGIANTO- H.E.A. MOKODOMPIT PEMKOT KENDARI APBD
TA 2021/2022)**

TESIS

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Magister Hukum

Oleh :

Rido Nursyahid Muttaqin, S.T.

NIM: 2320119008

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAAN
KONSTRUKSI ANTARA PEMERINTAH
DENGAN PERUSAHAAN KERJA SAMA OPERASI
(STUDI PROYEK JALAN KEMBAR KALI KADIA- Z.A. SUGIANTO- H.E.A.
MOKODOMPIT PEMKOT KENDARI APBD TA 2021/2022)

(Rido Nursyahid Muttaqin, NIM. 2320119008, Program Studi Magister Hukum,
Fakultas Hukum Andalas, 2025)

ABSTRAK

Pembangunan nasional di Indonesia, sebagai negara berkembang, berfokus pada pemerataan kesejahteraan melalui sektor jasa konstruksi, yang semakin diminati didukung oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, yang mendorong partisipasi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui Kerja Sama Operasi (KSO) untuk memenuhi kualifikasi proyek. Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa pemutusan kontrak antara Istaka Lesindo KSO dengan Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Kendari dengan mempelajari ketentuan standar kontrak konstruksi pemerintah, perjanjian KSO, dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 60/Pdt.G/2023/PN Kdi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teori kepastian hukum, kontrak, keadilan dan tanggungjawab untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, standar dokumen kontrak konstruksi pemerintah, standar dokumen perjanjian kerja sama operasi, putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak Kementerian PUPR sebagai regulator untuk memperoleh perspektif dari pembuat peraturan terhadap kasus ini. Kasus Istaka Lesindo KSO, yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa proyek jalan di Kota Kendari menunjukkan kompleksitas hukum KSO ketika PT. Istaka Karya (Persero), mitra KSO dengan kualifikasi usaha besar, dinyatakan pailit pada Juli 2022, memaksa PT. Lesindo Utamasakti, mitra berkualifikasi menengah, melanjutkan proyek skala besar yang melebihi kapasitas modalnya. Kegagalan menyelesaikan proyek sesuai target hanya 54,13% hingga April 2023 menyebabkan Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Kendari memutus kontrak secara sepihak, yang dianggap Istaka Lesindo KSO sebagai perbuatan melawan hukum karena dianggap merugikan pihaknya. Gugatan di Pengadilan Negeri Kendari (No. 60/Pdt.G/2023/PN Kdi) menghasilkan putusan pada 22 Januari 2024 yang menyatakan pemutusan kontrak batal demi hukum, memerintahkan ganti rugi dan pengembalian bank garansi, menegaskan pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdara. Penelitian ini mencerminkan tantangan pengadaan jasa konstruksi, kelemahan regulasi pengadaan barang dan jasa, dan pentingnya penyelesaian sengketa yang adil, baik melalui musyawarah, non-litigasi, maupun litigasi, dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia.

Kata kunci: *Kerja Sama Operasi, kontrak, sengketa, Pengadaan Barang dan Jasa*

SETTLEMENT OF DISPUTES REGARDING TERMINATION OF
CONSTRUCTION WORK CONTRACTS BETWEEN THE GOVERNMENT AND
JOINT OPERATION COMPANIES (CASE STUDY OF THE KALI KADIA – Z.A.
SUGIANTO – H.E.A. MOKODOMPIT TWIN ROAD PROJECT, KENDARI CITY
GOVERNMENT, TA 2021/2022)

(Rido Nursyahid Muttaqin, Student ID 2320119008, Master of Law Program, Faculty
of Law, Andalas University, 2025)

ABSTRACT

National development in Indonesia, as a developing nation, prioritizes the equitable distribution of welfare through the construction services sector, which has seen increasing demand. This trend is underpinned by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Presidential Regulation No. 12 of 2021 on the Procurement of Goods and Services, both of which promote the participation of small and medium enterprises (SMEs) via Joint Operation (Kerja Sama Operasi, “KSO”) arrangements to satisfy project qualification requirements. This study examines the resolution of a contract-termination dispute between Istaka Lesindo KSO and the Department of Public Works and Spatial Planning of Kendari City by analyzing: (1) the provisions of the standard government construction contract; (2) the KSO agreement; and (3) the Kendari District Court Decision No. 60/Pdt.G/2023/PN Kdi. Employing a normative-juridical approach with a descriptive-analytical character, the research is grounded in the theories of legal certainty, contract law, justice, and liability. Sources include statutory regulations, standard government construction contract documents, standard KSO agreement forms, court decisions, and interviews with officials from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) to capture the regulator’s perspective. The Istaka Lesindo KSO case—whose consortium was awarded the tender for a road infrastructure project in Kendari City—illustrates the legal complexities inherent in KSO arrangements. In July 2022, PT Istaka Karya (Persero), the KSO’s large-scale partner, was declared bankrupt, forcing PT Lesindo Utamasakti, the medium-scale partner, to continue a project whose scale exceeded its capital capacity. By April 2023, only 54.13% of the work had been completed, prompting the Department of Public Works and Spatial Planning of Kendari City to unilaterally terminate the contract—a measure Istaka Lesindo KSO deemed unlawful and prejudicial. The lawsuit filed in the Kendari District Court (No. 60/Pdt.G/2023/PN Kdi) culminated in a judgment dated 22 January 2024, declaring the termination null and void, ordering compensation, mandating the return of the performance bond, and affirming a breach of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata). This ruling underscores regulatory weaknesses in public construction procurement and highlights the necessity of fair dispute-resolution mechanisms—whether through negotiation, alternative dispute resolution, or litigation—within the framework of Indonesian contract law.

Keywords: Joint Operation (KSO); contract termination; dispute resolution; procurement of goods and services

